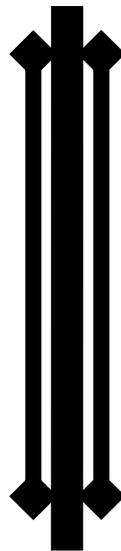


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

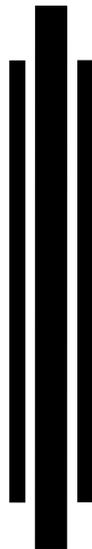


Karanganyar, 24 November 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



**LAMPIRAN II:
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021**



Karanganyar, 24 November 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



**RENCANA KERJA TAHUNAN
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

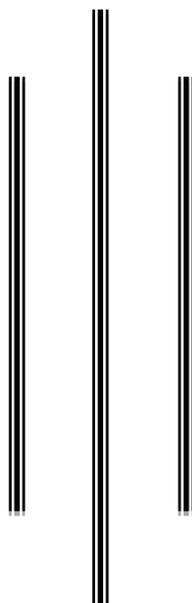


Karanganyar, 8 Juni 2020

LAMPIRAN



FORMULIR 1:
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2021



KARANGANYAR, NOVEMBER 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BELAKANG	
1. Kondisi Umum	1
2. Identifikasi Masalah	32
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	34
4. Tujuan Jangka Menengah	34
5. Sasaran Prioritas	35
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng	36
7. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar	54
8. Program Prioritas Kapolri, Program Quick Wins Dan Pembangunan Zona Integritas	70
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ALOKASI ANGGARAN	
9. Program dan Kegiatan Polres Karanganyar	71
10. Pagu Alokasi Anggaran	78
V. PENUTUP	
11. Penutup	80

Lampiran :

- I. Lampiran 1: Rencana Kerja Tahunan Polres Karanganyar T.A. 2021.
- II. Lampiran 2: Renja Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) format versi
Bappenas T.A 2021



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

Nomor: Kep/ 40 /XI/2020

Tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Kepolisian Resor Karanganyar Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/572/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draft akhir panduan penyusunan rencana kerja di lingkungan Polri.
4. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kapolri nomor : SE/2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pedoman perencanaan (DOMREN) Kapolri tahun 2021.
2. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Karanganyar Nomor : Kep/34/XI/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Karanganyar Tahun 2020-2024.
3. Perkiraan keadaan intelijen Polres Karanganyar T.A 2021.

4. Laporan

KEPUTUSAN KAPOLRES KARANGANYAR
NOMOR : KEP/ 40 /XI/2020
TANGGAL: 24 NOVEMBER 2020

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Karanganyar Tahun Anggaran 2019.
5. Surat Perintah Kapolres Karanganyar Nomor: Sprin/5397/XI/HUK.6.6./2020 tanggal 5 Nopember 2020 tentang Tim Pokja Penyusunan Revisi Rencana Kerja Tahun. 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Rencana Kerja Kepolisian Resor Karanganyar Tahun Anggaran 2021 sesuai Pagu Alogar Tahun Anggaran 2021, sebagai Pedoman pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dan sebagai Pedoman Penyusunan Revisi Rencana Kerja masing-masing Sub Satuan Kerja di jajaran Kepolisian Resor Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Dikeluarkan di: Karanganyar
pada tanggal : 24 November 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR


Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

Tembusan :

1. Kapolda Jateng
2. Irwasda Polda Jateng
3. Karorena Polda Jateng

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

I. LATAR BELAKANG.

1. Kondisi Umum.

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh komponen masyarakat lainnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian agar kegiatan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *Grand Strategy* Polri tahun 2005 – 2025. *Grand Strategy* dalam rangka memantapkan kemandirian Polri melalui rancangan paradigma baru Polri, maka Polri telah mencanangkan reformasi secara gradual yang meliputi reformasi instrumental, struktural dan kultural.

Dengan berpedoman pada *Grand Strategy* Polri (2005-2025) melalui tahapan *trust building, partnership building, strive for excellence* dan *excellent*, perwujudannya sebagaimana empat tahapan yang telah dicanangkan, tahap *Trust Building* pada tahap pertama masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan, tahap

Pathnership.....

Pathnership merupakan tahap penyertaan masyarakat dalam meningkatkan kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan semakin membaik, tahap *Strive for Excelen* pada tahap ke tiga kebutuhan masyarakat lebih mengharapkan pada *dimensionalservice quality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan semakin canggih, *Excellent* pada tahap ke empat Polri sudah menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas Dunia;

Pada Rencana Kerja T.A. 2021 merupakan tahun kedua pada Renstra akhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang sudah masuk pada tahap *Excellent*. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pemantapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi, Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut mekipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan;

Grand Strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ke empat *Excellent* yaitu Polri menerapkan kaidah- kaidah yang berlaku pada organisasi kelas Dunia Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (*Nation Competitivenes*), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini. Penggelaran Polri dalam *Community Policing* yang berbasis pada semangat kemanusiaan yang berbudi luhur merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi manajemen *knowledge* dan teknologi dalam organisasi dan manajemen Polri.

Sebagai upaya untuk melanjutkan reformasi birokrasi polri sebagai salah satu program *good governance* dari negara yang saat ini telah dicanangkan kearah kebijakan strategis melalui program revitalisasi polri, yang terdiri tiga pilar merupakan *roadmap* atau peta utama, yaitu: penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Sehingga diharapkan dari adanya tiga pilar tersebut Polri mampu

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan skala prioritas, sehingga mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, professional, proporsional, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibingkai dengan prinsip moral, etika dan etos kerja yang baik.

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap IV *Excellence* yaitu melakukan keunggulan. Kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti *extraordinary people* atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab, banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Hal ini sejalan dengan salah satu Visi Presiden RI yang mencanangkan program pentingnya pembangunan SDM menjadi prioritas, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara, adapun Visi Presiden RI yaitu:

- a. pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan lebih cepat;
- b. pembangunan SDM menjadi prioritas;
- c. membuka investasi yang seluas-luasnya;
- d. mereformasi Birokrasi terutama pada aspek struktural;
- e. menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, diantaranya adalah:

- a. terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045;

- b. kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- c. terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan;
- e. perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri

Oleh karenanya, sejalan dengan visi Presiden RI dan Instruksi Presiden RI maka untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang semakin kompleks maka Kapolri melanjutkan Program prioritas yaitu program kerja melalui *Commander wish* dan menekankan semboyan PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya).

- a. Profesional: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya;
- b. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatrus dan Alpakam yang makin modern;
- c. Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketiga pokok pikiran tersebut adalah untuk menjawab tantangan masa kini, di mana pola-pola pendekatan Polisi yang dulu diterapkan pada masa-masa sebelum reformasi sudah tidak relevan lagi dan perlu lebih ditingkatkan dengan pola baru yang tetap dalam roh tujuan Reformasi

Birokrasi Polri (RBP) untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa arus perubahan yang sangat deras. Sementara itu untuk menunjang dalam mewujudkan Tiga dasar pemikiran tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si menyusun pola strategi dengan penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju, yang terdiri dari:

Program Prioritas Kapolri, yaitu:

- a. mewujudkan SDM yang unggul;
- b. pemantapan harkamtibmas;
- c. penguatan gakum yang professional dan berkeadilan;
- d. pemantapan manajemen media;
- e. penguatan sinergi polisional;
- f. penataan kelembagaan;
- g. penguatan pengawasan.

Komitmen Kapolri, yaitu:

- a. mengamankan program pembangunan nasional;
- b. memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI Polri;
- c. mewujudkan insan Bhayangkara yang bersih dan bebas KKN;
- d. menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik;
- e. menyiapkan suksesi pimpinan Polri selanjutnya;

Keberlanjutan Program Promoter, yaitu:

- a. pemantapan reformasi internal Polri;
- b. peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI;
- c. penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;
- d. peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;
- e. peningkatan kesejahteraan anggota Polri;
- f. tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minimal Sarpras;
- g. bangun.....

- g. bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
- h. penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat);
- i. penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan;
- j. penguatan pengawasan;
- k. *Quick Wins* Polri.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua tahapan Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024, Renstra ini merupakan Renstra tahap akhir dari *Grand Strategi* Polri 2005-2025 merupakan tahap ke IV atau masuk pada tahap *Exellence*, Renstra sebelumnya menekankan pada pementapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah professional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan, sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra Polri 2020-2024 menekankan pada peran Polri yaitu sebagai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal diatas maka Renstra Polri dirancang dengan melihat kondisi umum Polri, yaitu capaian kinerja dari Renstra sebelumnya, tugas dan fungsi Polri, kondisi keamanan dan peran institusi Polri.

Pada perkembangannya Polri telah berupaya untuk senantiasa berbenah, salah satunya dengan membuat standar untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pejabat Polri yaitu tercetusnya konsep Indeks Tata Kelola yang merupakan instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Kepolisian yang baik, yang bersifat objektif, komprehensif sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan, sebagai tolak ukur kemajuan yang dicapai dan alat untuk memperbandingkan secara objektif, *fair* dan akurat. ITK mencoba mengukur sejauh mana reformasi kultural di tubuh Polri telah bergulir, sehingga perubahan-perubahan yang telah terjadi dapat dilihat secara jelas berdasarkan fakta data serta persepsi publik pengguna jasa Polri.

Pengukuran

Pengukuran ITK dilaksanakan berdasarkan tujuh prinsip tata kelola kepolisian yang baik yaitu kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari ITK adalah mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan prima kepolisian, dan meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Dengan adanya ITK diharapkan dapat diperoleh manfaat berupa potret kinerja dan pencapaian Reformasi Birokrasi Polri.

Untuk mewujudkan Program Prioritas Kapolri, Polres Karanganyar menjabarkan kedalam konsep yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi Kapolda Jawa Tengah “Polda Jateng Hadir” yaitu Polres Karanganyar siap hadir di Tengah Masyarakat untuk wujudkan Kabupaten Karanganyar yang aman dan tentram, adapun implementasinya dengan menjabarkan *Commander Wish* Kapolda Jateng, yaitu terdiri dari:

- a. Loyalitas Tegak Lurus Kepada Pimpinan Tertinggi Polri;
- b. Tingkatkan Soliditas 3 Pilar Plus;
- c. Antisipasi Serangan Teror dan Rusuh Massa;
- d. Perkuat Manajemen Media;
- e. Dukung Percepatan Penanganan Covid-19;
- f. Mantapkan Harkamtibmas Jelang Pilkada dan Pilkadaes Serentak Tahun 2020;
- g. Polda Jateng “Hadir”.

Kekuatan anggota di Polres Karanganyar sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 mencapai 827 personil yang terdiri dari 783 personil Polri dan 44 Pegawai PNS Polri, dengan satu Mako Polres, satu mako Sat Reskrim-Sat Lantas dan 17 Polsek yang tersebar di 17 Kecamatan. Sementara kemampuan personil dan dukungan sarana terus dikembangkan guna mencapai tingkat keamanan yang maksimal di wilayah ini. Dalam menyikapi situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan perkembangan aspek kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dalam mengambil keputusan pada setiap kegiatan mengarah pada tujuan dan sasaran yang tepat.

Kabupaten

Kabupaten Karanganyar terletak di antara 110° 40' – 110° 70' bujur timur dan 7° 28' – 7° 46' lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22-31 derajat celcius. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 773.78 KM² dengan batas daerah Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Magetan (Jatim) di sebelah timur, Kabupaten Boyolali dan Surakarta di sebelah barat serta Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri di sebelah selatan.

Jaringan jalan raya diwilayah Kabupaten Karanganyar secara umum terdiri dari jalur utara yaitu jalan jurusan Solo – Surabaya lewat Palur-Kebakkramat, jalur ekonomi, jalur cepat dan padat sehingga rawan laka lantas dan kemacetan. Jalur timur, jalan jurusan Solo – Tawangmangu lewat Palur-Karanganyar-Tawangmangu merupakan daerah wisata dengan arus padat khususnya pada hari-hari libur. Jalur Barat, jalan jurusan Solo-Puwodadi lewat Kecamatan Gondangrejo dengan kondisi jalan tidak rata sedangkan arus kendaraan padat dan rawan kecelakaan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar mencapai 915.522 jiwa dengan komposisi penduduk pria sejumlah 457.741 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 464.752 jiwa.

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai rata-rata 1.183 per M².

Kondisi wilayah yang beragam dengan kontur tanah yang bervariasi menjadikan potensi wilayah Karanganyar cukup beragam. Untuk tanah persawahan di Kabupaten ini mencapai 6.810.759,60 Ha, tanah perkebunan mencapai 14.693.656,17 Ha, serta luas Hutan Negara yang mencapai 16.775.807,93 Ha. Adapun tanah yang lain terbagi atas pemukiman, tegalan dan padang rerumputan. Jumlah obyek wisata cukup banyak sekitar 13 obyek wisata umumnya di wilayah pegunungan.

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Ideologi

- a) Kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Karanganyar masih tetap terjaga dengan baik, namun tetap

menjadi

menjadi atensi dan cegah dini agar tidak terjadi intoleransi antar penganut keyakinan / kepercayaan maupun antar agama.

- b) Permasalahan yang menjurus terjadinya SARA dan berdampak nasional, secara terus menerus mendapat perhatian dan antisipasi agar hal tersebut tidak sampai terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan dilakukan diantisipasi secara dini dan cepat serta tepat dalam menyelesaikan permasalahan sekecil apapun yang timbul di tengah masyarakat, sebelum permasalahan menjadi besar.
- c) Tetap muncul adanya aksi menolak keberadaan tempat ibadah penganut agama yang jumlahnya minoritas (agama Kristen) yang dilakukan oleh kelompok – kelompok organisasi Islam garis keras (JAS, JAT, LPD MMI, FUIK, AUIK), dengan berbagai dalih bahwa :
 - (1) Tidak adanya persetujuan dari lingkungan yang mayoritas memeluk agama Islam.
 - (2) Administrasi pendirian gereja belum memenuhi persyaratan / belum ada ijinnya.
 - (3) Tidak perlu untuk mendirikan tempat ibadah gereja, disebabkan umat nasrani jumlahnya sedikit dan bisa bergabung dengan umat yang sudah ada gerejanya.
- d) Tetap muncul aksi – aksi yang menimbulkan keresahan di permukaan yang dilakukan oleh kelompok – kelompok organisasi agama islam yang diindikasikan radikal, hal ini akan dimunculkan berkaian dengan :
 - (1) Kebijakan Pemerintah yang tidak sejalan dengan faham kelompok / organisasi agama islam yang diindikasikan radikal, seperti pemberian ijin tempat hiburan (Pub, Karaoke dsb).
 - (2) Pemberian ijin pembangunan tempat ibadah yang penganutnya jumlahnya minoritas.

(3) kegiatan

- (3) Kegiatan – kegiatan kebudayaan yang dianggap menyimpang dari agama islam (yang dianggap syirik bagi kelompok / ormas islam yang diindikasikan radikal).
- (4) Masih adanya aksi anarkhis terhadap pelaku pelanggaran Pekat di tengah masyarakat (perjudian, PSK, Miras), yang dilakukan atas dasar agama.
- e) Tetap akan muncul di permukaan kelompok – kelompok tertentu / organisasi masyarakat agama / ormas islam yang diindikasikan radikal tertentu yang belum dapat menerima dan terindikasi menolak Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara R.I serta tidak bersedia untuk mengibarkan bendera merah putih.
- f) Disamping itu adanya kelompok – kelompok agama islam yang diindikasikan radikal, yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan gangguan kamtibmas dan menurutnya apa yang dilakukan atas dasar agama dan apa yang dilakukan menurut agama yang dianut adalah halal / benar, seperti adanya aliran keyakinan beragama yang dianggap sesat, pembangunan tempat ibadah umat Nasrani, tempat – tempat hiburan yang diindikasikan berbau kemaksiatan maupun terhadap pelaku penyakit masyarakat.
- g) Aksi penolakan adanya organisasi Ahmadiyah di kewilayahan, untuk di Karanganyar keberadaan Organisasi Ahmadiyah ada di Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu yang dipimpin oleh Abdul Nasir, sehingga dimungkinkan setiap saat akan muncul gejolak di tengah masyarakat terutamanya ketentraman terhadap kerukunan warga organisasi Ahmadiyah Indonesia yang ada di Tawangmangu.
- h) Disamping itu juga keberadaan organisasi Yayasan Indonesia Damai (YASINDA) alamat Jl. Dr. Sutomo

lingkungan Tegalsari, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh Purwadi, dalam kegiatan agama menganut ajaran dari Minardi Mursyid. Organisasi Yayasan Indonesia Damai (YASINDA) merupakan perubahan dari nama organisasi dari YATAIN (Yayasan Tauhid Indonesia) dan kemudian berubah lagi menjadi LPPA (Lembaga Pengkajian dan Pendalaman Alquran Tauhid), disebabkan ajarannya menyimpang sebagaimana ajaranagama islam.

- i) Beberapa pelaku terorisme maupun jaringan terorisme yang telah berhasil ditangkap oleh Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sampai dengan tahun 2019 diketahui 17 orang pelaku diantaranya berasal dari Kabupaten Karanganyar, menandakan bahwa wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah yang menjadi atensi terhadap keberadaan pelaku aksi terorisme, di waktu mendatang akan memunculkan aksi – aksi teror yang dilakukan oleh jaringan yang sudah terbentuk untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menimbulkan situasi kamtibmas tidak kondusif, wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang dijadikan tempat mengendap sementara oleh pelaku terorisme.
- j) Aksi terorisme saat ini merupakan ancaman nyata untuk menimbulkan situasi keresahan di tengah masyarakat, terlebih lagi merupakan ancaman nyata bagi bagi anggota Polri pada saat melaksanakan tugas melayani masyarakat, dengan sasaran :
 - (1) Kantor Kepolisian (Polres maupun Polsek) yang berada dipinggir jalan raya.
 - (2) Pos – pos Polisi yang ada di pinggir jalan raya.
 - (3) Anggota Polri yang bertugas di lapangan pada saat bertugas melayani masyarakat maupun pada saat

melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat maupun kegiatan kunjungan VVIP / VIP.

- k) Menjadi atensi terhadap keberadaan kelompok – kelompok radikal yang sudah muncul di permukaan dan akan berkembang bilamana tidak diambil langkah – langkah pencegahan, kelompok tersebut berkiblat pada Irak dan Suriah (IS), telah lama ingin membentuk pemerintahan Islam di Negara Indonesia, maka Pemerintah Daerah telah mengambil langkah – langkah :
- (1) Dilakukan Rapat Koordinasi Instansi pemerintahan dan unsur – unsur agama terkait, untuk persamaan persepsi dalam pencegahan dan penanganan terhadap timbulnya intoleransi antar umat beragama, dengan menghadirkan tokoh – tokoh agama maupun organisasi islam yang diindikasikan radikal.
 - (2) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok agama maupun Mahasiswa dan pelajar, agar mengetahui bahayanya terhadap radikalisme maupun aksi terorisme, serta upaya cegah agar tidak bergabung didalamnya.
 - (3) Di masa mendatang jaringan pelaku terorisme akan merubah pola hidup di tengah masyarakat, sehingga keberadaannya akan sulit untuk dipantau bila tidak adanya dukungan dari masyarakat.
- l) Adanya kkelompok – kelompok / organisasi agama maupun yang dilakukan perseorangan, yang mengarah menentang kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kelompok – kelompok / organisasi yang mengarah terbentuknya syariat islam.

2) Politik

- a) Kegiatan Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019, melaksanakan kegiatan internal di tubuh Partai Politik

untuk menata diri dari awal menghadapi Pesta demokrasi pada periode berikutnya.

- b) Beberapa Partai Politik pada Tahun 2021 akan melaksanakan pergantian pimpinan / pengurus organisasi, diantaranya :
 - (1) Partai Golkar (PG).
 - (2) Partai Amanat Nasional (PAN).
 - (3) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
 - (4) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
 - c) Partai Politik menjalankan agenda organisasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, sebagaimana tertuang dalam AAD / ART masing – masing Partai Politik.
- 3) Ekonomi
- a) Setiap kali Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak)sangat berpengaruh terhadap kehidupan di tengah masyarakat, hal ini disebabkan adalah cepatnya harga – harga barang di pasaran mengalami lonjakan kenaikan harga, Namun ironisnya bila harga BBM (Bahan Bakar Minyak) turun, maka harga barang – harga barang di pasaran tetap dan tidak mengalami penurunan harga.
 - b) Adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), akan menimbulkan aksi unjuk rasa di kalangan masyarakat yang dilakukan organisasi mahasiswa maupun organisasi masyarakat yang ada, hal ini disebabkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) berdampak pada kenaikan harga – harga bahan pokok di tengah masyarakat.
 - c) Perbedaan Harga gas LPG ukuran tabung 12 Kg adalah Rp. 129.000 dengan tabung ukuran 3 Kg adalah Rp. 14.500 cukup besar, sehingga pengguna Gas LPG Tabung 12 Kg

beralih penggunaan ke Gas LPG ukuran tabung 3 Kg, sehinggaberdampak :

- (1) Persediaan gas LPG ukuran tabung 3 Kg terbatas tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
 - (2) Pelaku usaha menengah dalam menjalankan usahanya beralih menggunakan gas LPG tabung ukuran 3 Kg yang seharusnya menggunakan Gas LPG ukuran tabung 12 Kg.
 - (3) Didapatinya tabung gas yang rusak dan dipergunakan oleh masyarakat selaku konsumen, hal ini bila tidak diantisipasi sedini mungkin akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat selaku konsumen terutama bahaya kebakaran.
- d) Pendapatan perkapita sebagian besar penduduk Kabupaten Karanganyar adalah sebagai buruh pabrik dan petani, sehingga pendapatan belum merata dan memadai yang pada umumnya baru dapat mencukupi kebutuhan makan, hal tersebut tetap akan terjadi di masa mendatang disebabkan SDM yang terbatas.
- e) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560 / 58 / 2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang penetapan besarnya UMK Karanganyar Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.989.000 diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020 mendatang, sedangkan penetapan UMK setiap tahunnya akan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja.
- f) Setiap penetapan besarnya UMK yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, berdampak pada pekerja / buruh yang akan mengalami PHK (Pemutusan HubunganKerja), hal ini disebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja dan menggantikan dengan alat yang erupakan

kecanggihan teknologi, dampak yang ditimbulkan adalah bertambahnya pengangguran di tengah masyarakat.

- g) Pemerintah tidak ada rencana menaikkan Tarif Daya Listrik (TDL) pelanggan rumah tangga 900 VA yang dicabut subsidiya, sedangkan bagi para pengusaha yang nantinya sangat berdampak terhadap para pekerja, hal ini akan mengancam pekerja terancam PHK akibat hasil produksi menurun dan biaya listrik cukup tinggi, akan menimbulkan aksi gejolak sosial para pekerja agar pemerintah tidak menaikkan Tarif Daya Listrik yang menyebabkan timbulnya PHK, Adapun data kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh Pemerintah yang diberlakukan secara bertahap.
- h) Pengangguran akan bertambah disebabkan adanya pengurangan tenaga kerja akibat dari ketidak mampuan perusahaan memberikan upah sesuai UMK akibat dari pemasaran hasil produksi menurun, disamping setiap tahun bertambah pengangguran akibat putus sekolah.
- i) Adanya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja / buruh, disebabkan :
 - (1) Pengusaha tidak membayar upah buruh sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
 - (2) Hak normatif pekerja dikurangi sehingga kesejahteraan berkurang, dengan alasan pengusaha mengalami penurunan hasil produksi dan pemasaran.
 - (3) Masih diberlakukannya buruh kontrak sehingga sewaktu – waktu dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pemberian hak pesangon.
 - (4) Pengusaha menyatakan pailit sehingga melakukan perumahan pada karyawan dengan upah yang tidak sesuaidengan ketentuan.

j) Berkaitan

- j) Berkaitan dengan sarana akomodasi sebagai sarana angkutan umum dengan semakin banyaknya angkutan umum berbasis online, akan menjadikan persaingan bagi angkutan umum konvensional yang selama ini sudah ada, dampak yang akan terjadi diantaranya :
- 1) Masyarakat lebih condong menggunakan angkutan umum berbasis online, disebabkan biaya murah, efisien dan cepat.
 - 2) Pendapatan angkutan umum akan menurun dan juga disebabkan biaya perawatan yang tinggi yang berdampak setoran hasil juga tinggi, hal ini berakibat penghasilan yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
 - 3) Terjadinya benturan fisik antar kru angkutan umum berbasis online dengan kru angkutan umum konvensional.
 - 4) Angkutan umum melakukan aksi mogok sehingga berdampak roda perekonomian tersendat.
- k) Hasil pertanian yang mengalami kenaikan harga di pasaran adalah Beras, cabe, sayur – sayuran dan buah akibat faktor iklim / cuaca juga disebabkan sarana jalan yang mengalami kerusakan berat menghambat laju roda perekonomian dari desa ke kota.
- l) Perkembangan Harga bahan pokok pada jenis – jenis tertentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat selaku konsumen, bilamana mengalami kenaikan harga yang signifikan, seperti Daging sapi, daging ayam, telur ayam, beras maupun hasil pertanian.
- m) Disebabkan lapangan pekerjaan yang terbatas, SDM yang kurang dan faktor iklim mempengaruhi hasil pertanian, sehingga melakukan pekerjaan di sektor informal seperti sebagai pemulung, buruh tani maupun menjadi pekerja rumah tangga.

n) Faktor

- n) Faktor ekonomi yang menjadi penyebab timbulnya anak putus sekolah semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga dampak yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, hal ini juga didukung dengan adanya perusahaan yang melakukan PHK terhadap para pekerja yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.
- o) Pemerintah Daerah berupaya mengatasi masalah pengangguran, sehingga langkah yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah membuka berbagai lapangan pekerjaan dan juga pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri yang dapat juga memberikan pemasukan devisa daerah.
- p) Berkurangnya jumlah TKW ke Luar Negeri disebabkan birokrasi administrasi yang tertib, namun untuk masa mendatang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengiriman TKW secara ilegal yang banyak mengandung resiko.
- q) Kendala bagi para petani adalah terbatas dan mahalnya harga pupuk pertanian, sedangkan pupuk bersubsidi dalam penyalurannya tidak tepat sasaran, akibatnya adanya oknum yang memanfaatkan melakukan perbuatan yang menyimpang berupa pemalsuan pupuk bersubsidi untuk memperoleh keuntungan yang besar.
- r) Hasil pertanian dapat mengalami penurunan ataupun terjadi gagal panen, hal ini disebabkan oleh :
 - (1) Faktor cuaca yang merugikan petani sehingga hasil pertanian / panen terjual dengan harga rendah harga jual anjlok, sedangkan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat merambat naik.
 - (2) Akibat dari terjadinya panca roba maka hasil pertanian mengalami penurunan , hal ini disebabkan musim kemarau dan tanah pertanian mengalami kekeringan yang menyebabkan hasil pertanian menurun.

- (3) Gagalnya hasil panen juga disebabkan adanya serangan hama wereng maupun ulat menyerang tanaman petani, sehingga hasil pertanian mengalamikerugian yang cukup besar.
- 4) Sosial Budaya
- a) Kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Karanganyar tetapterjaga dengan baik, keresahan antar umat beragama yang muncul dipermukaan dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat yang menginginkan terjadinya perpecahan antar umat beragama, permasalahan yang menyangkut agama akan diselesaikan melalui jalur Forum Kerukunan Umat Beragama.
 - b) Penyakit masyarakat seperti judi, Miras dan Prostitusi maupun pengamen, gelandangan dan pengemis merupakan gejala sosial masyarakat yang memang sudah ada sejak jaman dahulu dan sulit untuk dihilangkan, berbagai langkah penindakan maupun pembinaan tetap akan dilakukan, karena hal itu merupakan titik awal pemicu timbulnya kriminalitas.
 - c) Gejala sosial yang lain akan muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok remaja dan pemuda yang ingin diakui jati dirinya, dengan membentuk kelompok – kelompok / komunitas untuk diakui di masyarakat, yang seringkali menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.
 - d) Pemerintah secara resmi telah menetapkan Tanggal 1 Mei adalah Hari Libur Nasional, dan para pekerja / buruh memperingati sebagai Hari Buruh Internasional / Nasional, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional / Nasional, melakukan aksi peringatan hari buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa dengan sasaran Kantor Setda dan Gedung DPRD Karanganyar, adapun tuntutan yang diajukan adalah

peningkatan kesejahteraan para pekerja / buruh perusahaan / pabrik.

- e) Pemaksaan kehendak dengan aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat di lingkungan perusahaan, menuntut untuk dapat dijadikan pekerja pada perusahaan yang berada di lingkungannya, tanpa mengindahkan kemampuan / skill yang dimiliki, dimana aksi yang dilakukan adalah aksi unjuk rasa yang mengarah tindakan anarkhis.
- f) Aksi unjuk rasa yang berujung dengan terjadinya aksi kekerasan tetap dijadikan budaya oleh kelompok masyarakat tertentu untuk menyampaikan aspirasinya demi kepentingan kelompoknya dengan alasan untuk kepentingan rakyat.
- g) Organisasi Masyarakat yang berbasis agama maupun Organisasi Masyarakat yang mempunyai jumlah massa besar di Kabupaten Karanganyar, akan selalu dilibatkan dalam kegiatan yang bernuansa politik dari tingkat desa sampai tingkat Pusat, diantaranya :
 - (1) Muhammadiyah
 - (2) NU (Nadlatul Ulama).
 - (3) LDII
 - (4) MTA
 - (5) Organisasi Banser.
 - (6) Ormas Partai Politik.
 - (7) Ormas Pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), PCNU Pagar Nusa, PSH Winongo..
 - (8) Komunitas / organisasi Buruh.
- h) Budaya leluhur nenek moyang yang turun temurun masih dipertahankan dan dilaksanakan sebagian besar masyarakat seperti Peringatan Malam 1 Syuro, Bersih Dusun / Desa, tolak bala dll, hal ini menimbulkan kontra dari kelompok agama Islam garis keras sehingga bila tidak

diantisipasi sedini mungkin akan menimbulkan kriminalitas dan situasi tidak kondusif.

- i) Semakin banyaknya terbentuk organisasi pemuda yang dalam kegiatannya bukan merupakan kegiatan sosial, namun kegiatan yang dilakukan lebih condong mengarah timbulkan gangguan kamtibmas berupa perkelahian antar kelompok, terutamanya terhadap organisasi masyarakat yang mempunyai jumlah anggota cukup besar (PSHT, PC Pagar Nusa dsb).
 - j) Menjadi atensi terhadap kegiatan keramaian di tengah masyarakat yang menghadirkan massa besar, diantaranya :
 - (1) Keramaian panggung hiburan masyarakat, dengan menghadirkan bintang tamu tingkat nasional.
 - (2) Kegiatan keagamaan yang menghadirkan pembicara terkenal dan condong untuk menimbulkan intoleransi antar umat beragama.
 - (3) Kegiatan dari kelompok – kelompok / organisasi / komunitas yang terbentuk, dalam kegiatannya menghadirkan massa besar dan juga berasal dari luar daerah.
 - k) Pemberitaan media massa yang tidak seimbang dengan realita yang terjadi di lapangan, merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan perilaku masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan – ketegangan dalam masyarakat dan berkembang menjadi masalah kamtibmas.
- 5) Keamanan
- a) Kejahatan konvensional (Curas, Curat, Curanmor, Upal, Penganiayaan Berat, Kebakaran / Pembakaran, Pembunuhan, Narkoba) akan meningkat dan tetap menjadi prioritas pertama dalam penanggulangan dan penanganannya.

b) Menjadi

- b) Menjadi atensi terhadap terjadinya Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun yang disebabkan faktor cuaca (musim panas yang berkepanjangan).
- c) Berbagai jenis psykotropika akan berkembang dan merambah sampai di tingkat pedesaan, terutamanya di kalangan anak – anak remaja dan pemuda yang sangat rentan dan didorong oleh keinginan yang besar.
- d) Tindak kriminalitas terjadi peningkatan disebabkan adanya dinamika masyarakat yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah sedangkan lapangan pekerjaan masih terbatas, jumlah pengangguran bertambah demikian juga anak putus sekolah bertambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari menjurus pada perbuatan tindak kriminalitas.
- e) Sejalan dengan perkembangan waktu ke waktu, terjadi pergeseran bentuk kejahatan konvensional mengarah kejahatan dimensi baru, seperti kejahatan asuransi, kejahatan Perbankan, Kejahatan Korupsi, Kejahatan Computer, kejahatan berkedok undian berhadiah maupun kejahatan terhadap surat – surat berharga dengan sasaran masyarakat yang taraf berpikir / SDM masih rendah dan terobsesi untuk dapat keuntungan besar dan dapat hidup layak.
- f) Kejahatan yang memanfaatkan teknologi tinggi juga muncul dengan pesat yang sangat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti Penipuan berkedok Arisan, Undian berhadiah maupun dengan membentuk Yayasan – yayasan baik yang berlatar belakang memperoleh harta peninggalan maupun yang berlatar belakang agama.

g) Disamping

- g) Disamping kejahatan yang menjadi atensi timbulnya kejahatan dengan ilmu gaib / gedam, hal ini akan sulit diungkapkan bila tidak terjadi tertangkap tangan.
- h) Perkelahian antar kelompok / komunitas / organisasi masyarakat tetap terjadi, hal ini disebabkan oleh sikap egois yang berlebihan dengan mengandalkan jumlah anggota yang tergabung didalamnya besar.
- i) Meningkatnya jumlah pengangguran akan menimbulkan peningkatan tindak kejahatan, hal ini disebabkan akibat kebutuhan hidup manusia.
- j) Setiap tahun jumlah kendaraan akan semakin meningkat, sehingga jumlah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas akan meningkat.
- k) Jalur tembus yang menghubungkan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Jatim melewati Kecamatan Tawangmangu, akan menimbulkan kerawanan – kerawanan, diantaranya :
 - (1) Terjadi aksi pemerasan terhadap pengguna jalan pada saat kendaraan mengalami kerusakan mesin, yang ditimbulkan oleh kelompok masyarakat, disebabkan lokasi sangat jauh dari keramaian masyarakat..
 - (2) Sangat potensial terjadinya kriminalitas berupa Curras maupun pemerasan, disebabkan kondisinya jauh dari keramaian.
 - (3) Merupakan salah satu jalur perpindahan para pelaku kejahatan konvensional maupun pelaku kejahatan terorisme.

b. Analisis

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Karanganyar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor -faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT, yaitu :

1) *Strength (Kekuatan).*

- . a) Polres Karanganyar dengan kekuatan personil sebanyak 783 anggota Polri, 42 anggota PNS, jumlah demikian hampir 64% merupakan putra daerah yang menguasai karakteristik daerah setempat;
- b) Kekuatan personel yang dimiliki Polres Karanganyar, telah tergelar mulai dari Polres sampai tingkat Polsek sebagai perkuatan Polres sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat terus diperkuat secara bertahap baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya dengan perbandingan kekuatan secara kuantitas Polres : Polsek adalah 48,8 % : 51,2% sedang secara kualitas 17,5 % : 82,5%;
- c) Dalam pelaksanaan tugasnya Polres Karanganyar dan seluruh jajarannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :

(1) Fasilitas .

- (a) Mako Polres Karanganyar : 1 Unit
- (b) Mako timur (Sat Lantas , Sat Narkoba dan Sat Reskrim) : 1 Unit
- (c) Mako Polsek : 17 Unit
- (d) Wisma Bhayangkara : 1 Unit
- (e) TK Bhayangkari : 1 Unit
- (f) SMP Bhayangkari : 1 Unit

(2) Materiil

(2) Materiil .

(a) Diseluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan kendaraan operasional R4 sebagai sarana pendukung Opsnal, Masing-masing Polsek di jajaran Polres Karanganyar saat ini telah mempunyai dua kendaraan opsnal R4.

(b) Seluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan kendaraan operasional R2 baik untuk kegiatan patroli maupun kegiatan Bhabinkamtibmas.

(c) Polres Karanganyar dan jajaran sudah dilengkapi sarana dan prasarana sebagai sarana pendukung kegiatan operasional, meliputi :

- Ranmor R6 : 2 Unit
- Truck : 3Unit
- Bus Middle : 2 Unit
- Ranmor R 4 : 24 Unit
- Ranmor R 2 Staf : 20 Unit
- Ranmor R2 opsnal : 214 Unit
- Sedan Patwal : 6 Unit
- Pick up : 36 Unit
- A C : 33 Unit
- Kipas Angin : 47Unit
- Komputer : 199 Unit
- TV : 30 Unit
- Laptop : 12 Unit
- Printer : 66 Unit
- Genset : 1 Unit
- Alkomlek : 1 Unit
- Alat Vicon : 1 Unit
- Satwa (anjing) : 7 ekor
- Rak Kayu : 42 Unit
- Rak Besi : 1 Unit
- Perahu Karet : 1 Unit
- Papan Visual : 19 unit

(d) Untuk mengantisipasi kerawanan dan kasus-kasus diwilayah jajaran Polres Karanganyar, telah dilengkapi senjata api dengan rincian sebagai berikut:

- Senpi Genggam : 300 pck revolver
- Senpi Bahu : 233 pck
- Senpi genggam lainnya : 24 pck

Dengan sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan guna memperlancar tugas pelayanan terhadap masyarakat;

- d) Peningkatan kinerja anggota Polres Karanganyar dalam penanganan kejahatan berimplikasi kontijensi (terorisme), pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada Polri;
- e) Adanya terobosan kreatif yang dilaksanakan Polres Karanganyar yaitu Deklarasi Anti Kekerasan dan Terorisme yang ditandatangani oleh semua elemen masyarakat, Karanganyar Bebas Pekat, Tiada Hari Tanpa Razia (THTR), Penandatanganan Kesepakatan Bersama Forkopimda tentang Kebhinekaan NKRI Harga Mati, *Park Walk Talk (PWT)*, *Blue Light Patrol* sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- f) Seluruh kegiatan operasional dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Satfung telah didukung anggaran sesuai DIPA Satker;
- g) Sat Reskrim dalam melakukan penyidikan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat / pelapor terhadap kasus yang ditangani dengan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) di tiap-tiap tahapan (satu kasus lima SP2HP);
- h) Kemampuan mayoritas anggota yang sudah dibekali dengan berbagai Pendidikan Pengembangan / kejuruan

(Dikbang/Dikjur) dan pelatihan - pelatihan fungsi (Prolat) dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan pembinaan Kepolisian, menjadikan pelaksanaan tugas lebih Profesional, Modern, dan Terpercaya;

- i) Personil PNS Polres Karanganyar jumlah 44 orang merupakan salah bantuan kekuatan untuk memaksimalkan keberadaan anggota Polri dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi.

2) *Weaknes* (**Kelemahan**)

- a) Dengan jumlah Polri 783 personil sedangkan jumlah penduduk Kab. Karanganyar 922.703 jiwa dengan rincian laki-laki 474.965 jiwa, dan perempuan 447.738 jiwa, maka rasio perbandingan antara Polri dengan Masyarakat 1 : 1.178 sehingga masih kurang memadai untuk maksimalisasi kegiatan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, idealnya 1 Polisi : 700 Penduduk;
- b) Personel yang dimiliki Polres Karanganyar yang tergelar di Polres untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat memiliki perbandingan secara kuantitas sumber daya manusianya adalah Polres : Polsek dengan perbandingan 48,8 % : 51,2% sedang secara kualitas sumber daya manusianya 17,5 % : 82,5% sehingga sehingga berpengaruh terhadap pelayanan di Tingkat Polres;
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana kepolisian yang dimiliki Polres Karanganyar sampai ketinggian Polsek dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri, antara lain :
 - (1) Polres Karanganyar antara lain :
 - (a) Belum memiliki gudang arsip di Mako (Sium).
 - (b) Belum memiliki Ranmor Inafis dan Lie Detector (Polygraph) Sat Reskrim.
 - (c) Belum memiliki Randis Operasional unit Propam sehingga terkendala dalam melaksanakan kegiatan

operasional.....

operasional pengawasan pada saat tugas operasi atau tugas rutin lainnya.

- (d) Belum adanya Rantis tahanan.
 - (e) Belum memiliki genset generator untuk mendukung tugas pokok Kepolisian.
 - (f) Kurangnya alsus (*handycam*, alat perekam, camera, alat penyadap) untuk mendukung tugas Sat Intelkam.
 - (g) CCTV di gudang amunisi/senpi, gudang logistik, belum ada.
 - (h) Gudang logistik belum sesuai dengan standar pergudangan
 - (i) Penambahan ruang isolasi bagi tahanan Narkoba;
- (2) Polsek Jajaran antara lain :
- (a) Saat ini Mako Polsek jajaran Polres Karanganyar masih ada sebagian yang sudah tidak bisa menampung seluruh unit kerja yang ada di Polsek dan tempat pelayanan masyarakat
 - (b) Masih ada beberapa kantor yang lahannya berstatus Pinjam Pakai, belum bersertifikat/ hak milik Kepolisian (HM)
HM : 18
Pinjam Pakai : 5
Belum sertifikat : 1
 - (c) Belum adanya genset generator untuk mendukung tugas pokok Kepolisian tingkat Polsek.
 - (d) Kendaraan Bhabinkamtibmas belum seluruhnya terpenuhi dari jumlah Bhabin 175 personel, yang sudah terdukung 87 personel dengan kondisi kendaraan layak 82 unit, tidak layak 5 unit.
 - (e) Kendaraan

- (e) Kendaraan Patroli R2 belum terpenuhi, idealnya tiap Polsek 3 (tiga) unit.
- (f) Belum adanya alsus untuk mendukung tupoksi tingkat Polsek (camera, handycam, alat penyadap, dan perekam).
- (g) Polsek Gondangrejo sering terkena banjir \pm 30 cm dan masih menempati lahan pinjam pakai.
- (h) Gudang penyimpanan senjata api belum sesuai standar keamanan.

Sehingga beberapa faktor tersebut diatas dapat berpebaruh terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat;

- d) Masih ada beberapa personil yang belum memiliki pemahaman serta aplikatif tentang perubahan perilaku terutama pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) sehingga dapat menghambat organisasi;
- e) Belum adanya sinkronisasi program kegiatan beserta anggaran yang serupa antar pelaksana kegiatan dalam terobosan kreatif tersebut sehingga cara bertindak masih belum bisa kompak;
- f) Masih adanya pers Polri yg belum mampu melaksanakan tupoksi bidang pembinaan dan operasional serta semangat kerja yang masih rendah.
- g) Masih kurangnya sumber daya manusia (penyidik/penyidik pembantu) yang memiliki sertifikasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga mengakibatkan pengungkapan kasus belum maksimal;
- h) Masih adanya Kultur lama Polri yang dimiliki oleh anggota dapat memicu kesalahpahaman dengan instansi samping maupun masyarakat, sehingga dapat membawa dampak negatif pada situasi kamtibmas dan citra Polri;

i) Masih

- i) Masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sehingga memperburuk citra Polri dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 3) *Opportunity (Peluang).*
- a) Kemampuan mayoritas anggota yang sudah dibekali dengan berbagai pendidikan kejuruan dan pelatihan dalam menghadapi operasi, menjadikan pelaksanaan tugas menjadi terfokus, efisien dan sesuai SOP dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b) Diadakannya pelatihan peningkatan kemampuan personil yang dilaksanakan di Polres dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman bagi personil yang belum pernah sama sekali memiliki Prolat maupun Dikbangspes/Dikjur dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat;
 - c) Adanya beberapa personil yang telah memiliki keterampilan dalam mengoperasikan beberapa sarana dan prasarana serta terdukungnya anggaran untuk dapat merawatnya sehingga dapat memperpanjang usia pakai;
 - d) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan polisi dan Masyarakat (BKPM), dan Forum Kemitraan Polri lainnya;
 - e) Adanya kebijakan otonomi daerah di lingkungan Pemda sehingga memudahkan sarana komunikasi antara pemda Kab Karanganyar dengan Polres Karanganyar dalam bidang Harkamtibmas yang kondusif;
 - f) Adanya peluang dan kesempatan yang diberikan bagi personil Polri untuk menggali dan meningkatkan karier dan kemampuan baik dibidang ilmu kepolisian maupun pendidikan umum,

berpotensi besar bagi terciptanya profil polri yang tangguh, professional, modern, terpercaya dan memiliki wawasan;

- g) Diberikannya kesempatan bagi penyidik/penyidik pembantu untuk mengikuti Dikbangspes, prolat yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai bentuk sertifikasi sehingga mampu menambah jumlah personil yang kompeten dalam bidang peyidikan perkara;
- h) Adanya peran aktif dari instansi terkait yang mendorong Polri untuk terus maju dan dapat mewujudkan satuan yang tangguh dan mampu bersinergi dengan instansi terkait dalam membangun wilayah Karanganyar yang aman dari segi kamtibmas dan penegakan hukum.
- i) Banyaknya organisasi pemuda seperti Senkom Mitra Polri, Banser, Kokam, Pemuda Pancasila dan Organisasi lainnya. Dapat diberdayakan untuk bermitra dengan Polri guna mendukung terciptannya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Karanganyar.

4) *Threat (Ancaman)*

- a) Masih adanya persepsi negatif terhadap kinerja Polri, baik dalam penanganan kasus pidana, pelayanan masyarakat maupun penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- b) Personil yang belum memiliki kompetensi Dikbangspes/Dikjur dan Prolat adalah dengan usia yang tidak produktif lagi/usia menjelang purna tugas, sehingga tidak lagi memiliki kemampuan yang cepat dalam menerima kemajuan teknologi saat ini;
- c) Tidak semua sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dioperasionalkan oleh personil yang terampil dan mengerti sehingga dapat berakibat rusaknya sarana dan prasarana;

d) Masih

- d) Masih adanyabeberapa kelompok/perorangan dari masyarakat yang kurang simpati terhadap Polri, berpotensi untuk menciptakan gangguan kamtibmas dan menghambat pencapaian tujuan pelaksanaantugas Polri, perilaku dan konflik pribadi yang dialami oleh sejumlah anggota berpeluang untuk mempengaruhi kinerja di dalam pelaksanaan tugas;
- e) Sikap kritis masyarakat terhadap akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang berpotensi terhadap munculnya perilaku menyimpang dari warga masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- f) Kegiatan operasional yang harus disesuaikan dengan dinamika kejadian yang sifatnya situasional mengakibatkan adanya pembiayaan yang memerlukan alokasi lebih sedangkan anggaran yang tersedia terbatas;
- g) Terkendalanya penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pada saat personil diberangkatkan untuk melaksanakan Dikbangspes ataupun prolat;
- h) Adanya kelompok Radikal, pendukung atau simpatisan Ormas Radikal di wilayah Surakarta yang sering melakukan aksi sweeping di lokasi rawan Penyakit masyarakat dan potensi konflik sosial (baik vertikal maupun horisontal) di wilayah Hukum Polres Karanganyar, yang akan berdampak timbulnya gangguan kamtibmas;
- i) Tidak adanya penambahan personil PNS Polri yang seimbang seiring lebih banyaknya PNS Polri yang pensiun.

2. Identifikasi

2. Identifikasi Masalah.

Setelah mempelajari beberapa aspek kehidupan masyarakat dan kondisi internal serta eksternal Polres Karanganyar yang dianalisis melalui analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dan mungkin terjadi pada tahun 2021 yaitu:

- a. Masih kurangnya personel Polri di jajaran Polres Karanganyar yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya khususnya di Polsek-Polsek,sampai awal tahun 2020 sebagian besar jumlah personel di Polsek jajaran Polres Karanganyar belum mencapai 50 % yang memiliki pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diharapkan pada tahun 2021 dapat mencapai 80 % personil dapat mengikuti peningkatan kompetensi;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana di Bidang Tahti untuk menyimpan barang bukti yang selama ini belum memiliki gudang penyimpanan dan tempat pengelolaan barang bukti sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, diharapkan pada tahun 2021 Polres Karanganyar sudah memiliki tempat penyimpanan barang bukti;
- c. Belum sepenuhnya terjadi perubahan budaya Polri yang mencakup perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam pelaksanaan tugas bagi anggota Polri dan PNS Polri di jajaran Polres Karanganyar;
- d. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang tidak diikuti dengan rekayasa lalu lintas yang tepat;
- e. Belum optimalnya pelatihan dan Alkom, serta perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri yang masih kurang ideal, sehingga kurang optimalnya pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, diharapkan ada tambahan pelatihan personil Polri baru dan alat komunikasi (Alkom) yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas;

f. Masih

- f. Masih terbatasnya dukungan anggaran yang diterima khususnya untuk mendukung kegiatan opsnal dan pembinaan sampai dengan tingkat Polsek maupun anggaran dalam pemeliharaan alsus;
- g. Belum maksimalnya hubungan antara Polri dengan masyarakat yang diemban oleh Bhabinkamtibmas dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga kurang partisipasi masyarakat dalam bidang harkamtibmas;
- h. Kurangnya Jaringan informasi intelijen dalam masyarakat tertentu, sehingga ada beberapa kegiatan masyarakat yang tidak termonitor oleh Polri;
- i. Pada Tahun 2021 merupakan tahun strategis bagi Kabupaten Karanganyar dan Polres Karanganyar sehubungan akan muncul dampak diselenggarakannya Pemilihan kepala desa secara langsung sehingga dimungkinkan terjadinya konflik horizontal;
- j. Belum terdukungnya usulan pembangunan Polsek Gondangrejo yang sering mengalami bencana alam banjir, Polsek Karangpandan dan Polsek Mojogedang yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai sehingga menghambat pelayanan Polri kepada masyarakat;
- k. Masih tingginya angka pengguna dan pengedar Narkoba sehingga diperlukan seperangkat sarana untuk Binluh dan personil yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan penyuluhan;
- l. Belum maksimalnya pelaksanaan olah TKP karena tidak didukung dengan Ranmor R4.

II. TUJUAN

II. TUJUAN DAN SASARAN

3. VISI DAN MISI

a. Visi dan Misi Polda Jateng

- 1) Visi
“Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib”
- 2) Misi
Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat

b. Visi dan Misi Polres Karanganyar

- 1) Visi
“Terwujudnya Kabupaten Karanganyar Yang Aman dan Tertib”
- 2) Misi
Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jawa Tengah.

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polda Jateng yang professional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Jateng;
- 5) Menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan jangka menengah Polres Karanganyar

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polres Karanganyar yang professional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polres Karanganyar;
- 5) Menerapkan manajemen Polres Karanganyar yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Jateng Tahun 2021

Sasaran Prioritas Polda Jateng tahun 2021 yang sudah disesuaikan dengan surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pertama** Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial di Jawa Tengah termasuk di Wilayah pulau terluar perpenghuni”;
- 2) **Kedua** “Mengoptimalkan pelayanan publik Polri di jajaran Polda Jawa Tengah”;
- 3) **Ketiga** “Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya”;
- 4) **Keempat** “meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah”;
- 5) **Kelima** “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara bertahap dan berkelanjutan di Polda Jawa Tengah”;
- 6) **Keenam** “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”.

b. Sasaran Prioritas Polres Karanganyar Tahun 2021.

Sasaran Prioritas Polres Karanganyar tahun 2021 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pertama** “Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Khususnya di sektor Industri, pariwisata dan investasi”;
- 2) **Kedua** “Mengoptimalkan pelayanan publik Polri Polres Karanganyar”;
- 3) **Ketiga** “Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya”;
- 4) **Keempat** “meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Karanganyar”;

5) **Kelima**

- 5) **Kelima** “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara bertahap dan berkelanjutan di Polres Karanganyar”;
- 6) **Keenam** “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Jateng Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. arah Kebijakan dalam rangka pencapaian Sasaran Prioritas “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial di Jawa Tengah termasuk di Wilayah pulau terluar berpenghuni”, yaitu:

- 1) peran intelijen Polda Jawa Tengah dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polda Jateng yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di Jawa Tengah.
 (giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1)

- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)

- b) meningkatkan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- c) pembinaan karakter terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1)
- d) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan keluarganya.
(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “*Community Policing*”;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas di Polda Jateng kepada BUJP dan Satpam;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- b) pembinaan eksistensi FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat)/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) di Polda Jateng.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 4) penanganan

- 4) penanganan konflik secara humanis di wilayah Jawa Tengah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas Pemuda, Perempuan dan Anak guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial di wilayah Jawa Tengah;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) pelaksanaan kontijensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial, bencana alam dan terorisme.
(giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 5) meningkatkan peran Polda Jateng di wilayah rawan bencana dan wabah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontijensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;
(giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) menyiapkan personel Polda Jateng yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergitas kemitraan dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana;
(giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - c) peningkatan pelatihan kemampuan, dan profesionalisme Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - d) bersama-sama instansi terkait bekerjasama membangun Pusat penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan

kegiatan Bhakti Sosial Kamtibmas di wilayah Jawa Tengah. (giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1)

- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Jawa Tengah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan Dikmas Lantas untuk mewujudkan budaya tertib Lalu Lintas di wilayah Jawa Tengah; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) melaksanakan penggelaran personel pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - c) peningkatan penggunaan RTMC (*Regional Traffic Management Center*); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - d) pengembangan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun 2021; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pelaksanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/Internasional tahun 2021;

(giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 8) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polda Jateng dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) kesiapan personel Polda Jateng untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat5087,3128,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1)

b) melaksanakan

- b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah Jawa Tengah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan di wilayah Jawa Tengah yang kondusif.
(giat5087,3120,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 9) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembuatan MoU dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) peningkatan kerjasama Polisional dalam rangka kerjasama instansi terkait guna meningkatkan citra Polri di masyarakat.
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 10) penggelaran patroli kapal Polda Jateng di wilayah Jawa Tengah serta pulau terluar berpenghuni guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
patroli kapal Polda Jateng di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri di Jajaran Polda Jawa Tengah”, yaitu:

1) pengembangan

- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK di Polda Jateng;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan dan peningkatan Fasilitas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik ditingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat3072,3084,5062/prog1,2/SP2/SS5/IKP11)
 - b) mendukung pembangunan ruang RPK (ruang pelayanan khusus) di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) yang terintegrasi secara online;
(giat3071/prog1,2/SP2/SS4/IKP4)
 - c) mengusulkan pengadaan Alsuspol yang modern dan berbasis TIK; (giat3071,3084/prog1,2/SP2/ SS4/IKP5)
 - d) peningkatan sistem pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3128/prog1/SP2/ SS5/IKP11)
 - e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (3128/prog1/SP2/ SS5/IKP11)
 - f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi di Polda Jateng;
(giat3071/prog1/SP2/SS5/IKP11)

- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan penilaian kepuasan layanan Kesehatan di Rumkit Bhayangkara Semarang;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11)
 - b) menerbitkan KTA dan Ijazah Satpam serta melaksanakan pelayanan surat ijin operasional (SIO) BUJP secara profesional;
(giat5076/prog4/SP2/SS5/IKP11)
 - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan;
(giat3100/prog3/SP2/SS5/IKP2)
 - d) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;
(giat3137/prog5/SP2/SS2/IKP)
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum Secara Berkeadilan dan Terpecaya”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Jawa Tengah;
(giat4342/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - b) melakukan penyelidikan dalam rangka pendataan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme; (giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - c) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, narkoba (TPPU), terorisme, karhutla/LH dan siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(giat3140,3141,3142,3144,3145,3146,3151,4342,4343,5083 prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - d) melanjutkan

- d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
(giat3140,3141/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - e) melanjutkan pemantauan dan pendataan teroris di wilayah Jawa Tengah;
(giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - f) melanjutkan peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional;
(giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - i) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel.
(giat3137,3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda Jateng;
(giat3137/prog5/SP3/SS3/IKU2)
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat3140,3141/prog5/SP3/SS3/IKU2)
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan koordinasi dan pengawasan dengan *stakeholder* dibidang penyelidikan dan penyidikan;
(giat3137,3141,4342,5085,5086/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - b) mendukung

- b) mendukung pengembangan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan).
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2)
- 4) mendukung pengembangan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasikan (SPPT-TI dan E-MP).
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melakukan penginputan data E-MP secara cepat waktu dan tepat;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2)
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah”, yaitu:
 - 1) membenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) upgrading kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% teori seluruh pendidikan; (giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) upgrading dan sertifikasi gadik/instruktur;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas;
(giat3100,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/SS3/IKP1)
 - d) peningkatan kapasitas SDM bidang siber polri;
(giat3100,3151,3141/prog3,5/SP4/SS3/IKP1)
 - e) sertifikasi profesi anggota polri.
(giat3068,3100,3137/prog1,3,5/SP4/SS3/IKP1)
 - 2) tersusunnya program penyiapan kader unggul;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) menyiapkan

- b) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih, dan bebas dari praktik KKN. (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- 3) penataan kelembagaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi;
(giat5053/prog1/SP4/SS5/IKP11)
- b) menyelenggarakan penataan kelembagaan Polres;
(giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
- c) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polsek dan Polsubsektor;
(giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
- d) mendukung kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan. (giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
- 4) melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip “BETAH” berbasis T.I;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* ditingkat Polda;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* guna mendapatkan personel yang kompeten;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- d) mendukung

- d) mendukung bijak diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polri yang Promoter.
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP2)
- 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merryt system* melalui *Assesment Center*;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- b) sertifikasi terhadap personel Polda Jateng sesuai dengan fungsi Kepolisian; (giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- c) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Biddokkes Polda Jateng;
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP1)
- d) mendukung kelanjutan penyusunan regulasi rumpun jabatan fungsional;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- e) melanjutkan mapping jabatan fungsional dari tingkat Polda sampai dengan satker kewilayahan;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi.
(giat3110/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- 6) mendukung kajian peningkatan Tunjangan lebih dari 70%; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung pengajuan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih dari 70%;
(giat3068,5054/prog1/SP4/SS5/IKP7)
- b) meningkatkan nilai AKIP dan nilai Reformasi Birokrasi Polda Jateng;

(giat5054.....

(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7,10,11)

- c) meningkatkan penilaian apresiasi BPK tentang perwabkeu Polri.

(giat3068/prog1/SP4/SS5/IKP9)

- 7) peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparatur Polri.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri;

(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1)

- b) melaksanakan latihan ketrampilan dan pembekalan ketrampilan khusus bagi personil Polri menjelang purna tugas;

(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1)

- c) mempertahankan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara Polda Jateng melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);

(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP1)

- d) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes.

(giat3073/prog1/SP4/SS3/IKP1)

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pengembangan Almatrus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan di Polda Jawa Tengah”, yaitu:

- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Almatrus sesuai dengan teknologi terkini;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Mendukung pemenuhan Almatrus Polda Jateng yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan

unjuk

- unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- b) mendukung kelanjutan pembangunan BPKB dan STNK online;(giat3133/prog4/SP5/SS4/IKP3)
 - c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil dan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Jateng ke Slog Mabes Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - d) mendukung pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi Kepolisian terkini;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP5)
 - e) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi alpalkam dan almatsus Polri.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5).
- 2) Pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran, kesehatan, rumah dinas di Polda Jateng; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personil Polda Jateng;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
 - b) melanjutkan penyusunan renbut fasilitas perkantoran dan rumdin di Polda Jateng; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - c) melaksanakan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Polda Jateng secara selektif prioritas dan berkelanjutan. (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
- 3) mendukung penyusunan katalogisasi Alsuspol Fungsi Polda Jateng; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menerima dan mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus Polri ke wilayah jajaran Polda Jateng;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) mendukung

- b) mendukung penyusunan pemetaan katalogisasi almatsus dan alpalkam Polri; (giat5060/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - c) mendukung pembangunan metadata identifikasi terorisme.(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- 4) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus PoldaJateng;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan anev terhadap Alpalkam dan Almatsus Polda Jateng yang di distribusikan dari Mabes Polri;
(giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- 5) pengembangan SCI di kewilayahan secara bertahap:
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan pengembangan laboratorium forensik dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan hukum;
(giat3137/prog5/SP5/SS4/IKP5)
 - b) melanjutkan penyusunan renbut fasilitas perkantoran dan rumdin di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.
(giat5060/prog2/SP5/SS4/IKP4)
- 6) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara *online*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung penyusunan standar pembangunan SPKT sesuai SPM; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
 - b) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat ijin opsional BUJP. (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3)
- 7) pengembangan

- 7) pengembangan Almitsus SCI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan Almitsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber; (giat5062,3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) modernisasi teknologi alpakam dan almitsus Bidlabfor secara bertahap. (giat3137/prog5/SP5/SS4/IKP5)
 - 8) mendukung pembangunan pusat pergudangan polri yang modern dan terintegrasi serta pusat Layanan pengadaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
mendukung pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan tata kelola pergudangan. (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - 9) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan Almitsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) mendukung pembangunan *Cyber Digital Lab*. (giat3084,5062/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - b) penerapan

- b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat3073,5086/prog1,5/SP6/SS5/IKP13)
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar. (giat3091,5086/Prog1,5/SP6/SS5/IKP14)
- 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Instansi terkait; (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda; (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - c) mengintensifkan Satgas Saber pungli terhadap pungli yang membajak program pemerintah. (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polda Jateng;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun

2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

(giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP14)

- b) mendukung kelanjutan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN.

(giat3088,3089,3090,3091/prog1/SP6/SS5/IKP14)

- c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)

- 4) pengawasan berbasis TI;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mendukung optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan;

(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)

- b) penerapan system pengaduan masyarakat secara online.

(giat3073/prog1/SP6/SS5/IKP13)

- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mendukung pelaksanaan pendampingan Satker/Satwil atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerja Polri Berkelas Dunia guna persiapan dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap pemenuhan indikator WISPI dan UNPSA; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)

- b) mempertahankan capaian satker/satwil zona integritas yang sudah berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona integritas berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM); (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)

- c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online*

(ITK-O)

- (ITK-O) tingkat Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
- d) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - f) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik. (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)

7. Arah

7. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Karanganyar Tahun 2021, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. arah Kebijakan dalam rangka pencapaian Sasaran Prioritas “Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam Rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Khususnya di sektor Industri, pariwisata dan investasi di Kabupaten Karanganyar ”:

1) peran intelijen Polres Karanganyar dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polres Karanganyar yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di Jawa Tengah.
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1)

2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)

b) meningkatkan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)

c) pembinaan

- c) pembinaan karakter terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1)
- d) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan keluarganya.
(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1).
- 3) peningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “*Community Policing*”;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembangan kewenangan kepolisian terbatas di Polres Karanganyar kepada BUJP dan Satpam;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- b) pembinaan eksistensi FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat)/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) di Polres Karanganyar.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 4) penanganan konflik secara humanis di wilayah Kabupaten Karanganyar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas Pemuda, Perempuan dan Anak guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial di wilayah Kabupaten Karanganyar;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- b) pelaksanaan

- b) pelaksanaan kontijensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial, bencana alam dan terorisme.
(giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 5) meningkatkan peran Polres Karanganyar di wilayah rawan bencana dan wabah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontijensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;
(giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- b) menyiapkan personel Polres Karanganyar yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergitas kemitraan dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana; (giat3128/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- c) peningkatan pelatihan kemampuan, dan profesionalisme Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- d) bersama-sama instansi terkait bekerjasama membangun Pusat penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bhakti Sosial Kamtibmas di wilayah Jawa Tengah.
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1)
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Kabupaten Karanganyar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan

- a) melaksanakan Dikmas Lantas untuk mewujudkan budaya tertib Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) melaksanakan penggelaran personel pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - c) peningkatan penggunaan RTMC (*Regional Traffic Management Center*); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - d) pengembangan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun 2021;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pelaksanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/Internasional tahun 2021; (giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1)
- 8) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polres Karanganyar dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) kesiapan personel Polres Karanganyar untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat5087,3128,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah Kabupaten Karanganyar; (giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna

mewujudkan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Karanganyar yang kondusif.
(giat5087,3120,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1)

- 9) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembuatan MoU dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1)
 - b) peningkatan kerjasama Polisional dalam rangka kerjasama instansi terkait guna meningkatkan citra Polri di masyarakat. (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1)

b. Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian Sasaran Prioritas **“Pelayanan Publik Polri di Jajaran Polres Karanganyar”**, yaitu:

- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK di Polres Karanganyar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik ditingkat Polres maupun Polsek untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri.
(giat3072,3084,5062/prog1/SP2/SS5/IKP11)
 - b) mendukung pembangunan ruang RPK (ruang pelayanan khusus) di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) yang terintegrasi secara online;
(giat3071/prog1,2/SP2/SS4/IKP4)
 - c) mengusulkan pengadaan Alsuspol yang modern dan berbasis TIK; (giat,3084/prog1,2/SP2/ SS4/IKP5)
 - d) peningkatan sistem pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau

menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (giat3128/prog1/SP2/ SS5/IKP11)

e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (3128/prog1/SP2/ SS5/IKP11)

f) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi di Polres Karanganyar; (giat3071/prog1/SP2/SS5/IKP11)

2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melakukan penilaian kepuasan layanan Kesehatan di Poliklinik Polres Karanganyar; (giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11)

b) mengusulkan penerbitan KTA dan Ijazah Satpam serta melaksanakan pelayanan surat ijin operasional (SIO) BUJP secara profesional; (giat5076/prog4/SP2/SS5/IKP11)

c) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan. (giat3100/prog3/SP2/SS5/IKP2)

d) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel; (giat3137/prog5/SP2/SS2/IKP)

c. arah

- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”**, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan penyelidikan dalam rangka pendataan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme; (giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - b) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, narkoba (TPPU), terorisme, karhutla/LH dan siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (giat3140,3141,3142,3144,3145,3146,3151,4342,4343,5083 prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*); (giat3140,3141/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - e) melanjutkan pemantauan dan pendataan teroris di wilayah Kabupaten Karanganyar; (giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - f) melanjutkan peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional; (giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - i) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel. (giat3137,3142/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - 2) melaksanakan

- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polres Karanganyar; (giat3137/prog5/SP3/SS3/IKU2)
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP; (giat3140,3141/prog5/SP3/SS3/IKU2)
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan koordinasi dan pengawasan dengan *stakeholder* dibidang penyelidikan dan penyidikan; (giat3137,3141,4342,5085,5086/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - b) mendukung pengembangan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan). (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2)
 - 4) mendukung pengembangan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasikan (SPPT-TI dan E-MP).
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melakukan penginputan data E-MP secara cepat waktu dan tepat;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2)
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Karanganyar”, yaitu:
- 1) tersusunnya program penyiapan kader unggul;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyusun

- a) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih, dan bebas dari praktik KKN. (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- 2) penataan kelembagaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi; (giat5053/prog1/SP4/SS5/IKP11)
 - b) menyelenggarakan penataan kelembagaan Polres; (giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
 - c) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polsek; (giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
 - d) mendukung kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan. (giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP11)
- 4) melaksanakan rekrutmen proaktif dengan prinsip “BETAH” berbasis T.I;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membantu menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* ditingkat Polres; (giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas; (giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - c) mengusulkan anggota untuk uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* guna mendapatkan personel yang kompeten; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - d) mendukung

- d) mendukung bijak diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polri yang Promoter. (giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP2)
- 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merryt system* melalui *Assesment Center*; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) sertifikasi terhadap personel Polres Karanganyar sesuai dengan fungsi Kepolisian; (giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - c) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Urkes Polres Karanganyar; (giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP1)
 - d) mendukung kelanjutan penyusunan regulasi rumpun jabatan fungsional; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - e) melanjutkan mapping jabatan fungsional dari tingkat Polres sampai dengan satker kewilayahan; (giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - f) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasar spesialisasi. (giat3110/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- 6) mendukung kajian peningkatan Tunkin lebih dari 70%; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung pengajuan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih dari 70%; (giat3068,5054/prog1/SP4/SS5/IKP7)
 - b) meningkatkan nilai AKIP dan nilai Reformasi Birokrasi Polres Karanganyar; (giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7,10,11)
 - c) berkontribusi

- c) berkontribusi meningkatkan penilaian apresiasi BPK tentang perwabkeu Polri. (giat3068/prog1/SP4/SS5/IKP9)
- 7) peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri; (giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1)
 - b) melaksanakan latihan ketrampilan dan pembekalan ketrampilan khusus bagi personil Polri menjelang purna tugas; (giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1)
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pengembangan Almatasus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan di Polres Karanganyar”, yaitu:
 - 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Almatasus sesuai dengan teknologi terkini;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) Mendukung pemenuhan Almatasus Polres Karanganyar yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) mendukung kelanjutan pembangunan BPKB dan STNK online; (giat3133/prog4/SP5/SS4/IKP3)
 - c) melanjutkan inventarisasi kondisi riil dan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Almatasus dan Almatasus Polres Karanganyar ke Polda Jawa Tengah; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - d) mendukung

- d) mendukung pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi Kepolisian terkini; (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP5)
 - e) mendukung pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi alpalkam dan almatsus Polri. (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5).
- 2) Pemenuhan rumah dinas aparatur Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran, kesehatan, rumah dinas di Polres Karanganyar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas bagi pejabat kabag dan Kasat Polres Karanganyar; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
 - b) melanjutkan penyusunan renbut fasilitas perkantoran dan rumdin di Polres Karanganyar; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - c) melaksanakan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Polres Karanganyar secara selektif prioritas dan berkelanjutan. (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
- 3) mendukung penyusunan katalogisasi Alsuspol Fungsi Polres Karanganyar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menerima dan mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus Polri ke wilayah jajaran Polres Karanganyar; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) mendukung penyusunan pemetaan katalogisasi almatsus dan alpalkam Polri; (giat 5060/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - c) mendukung pembangunan metadata identifikasi terorisme. (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- 4) evaluasi

- 4) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polres Karanganyar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melaksanakan anev terhadap Alpalkam dan Almatsus Polres Karanganyar yang di distribusikan dari Polda Jateng;
(giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- 5) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara *online*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mendukung penyusunan standar pembangunan SPKT sesuai SPM; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4)
 - b) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat ijin opsional BUJP.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3)
- 7) pengembangan Almatsus SCI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber;
(giat5062,3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - b) modernisasi teknologi alpakam dan almatsus Bidlabfor secara bertahap.
(giat3137/prog5/SP5/SS4/IKP5)
- 8) mendukung pembangunan pusat pergudangan polri yang modern dan terintegrasi serta pusat Layanan pengadaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
mendukung pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan tata kelola pergudangan.
(giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- 9) pembangunan

- 9) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengembangan Alamsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP5)
 - c) mendukung pembangunan *Cyber Digital Lab*.
(giat3084,5062/prog2/SP5/SS4/IKP5)
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat3073,5086/prog1,5/SP6/SS5/IKP13)
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
(giat3091,5086/Prog1,5/SP6/SS5/IKP14)
- 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan

- a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Instansi terkait; (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polsek sampai dengan Polres; (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - c) mengintensifkan Satgas Saber pungli terhadap pungli yang membajak program pemerintah. (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polres Karanganyar; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri; (giat3089,3091/prog1/SP6/SS5/IKP14)
 - b) mendukung kelanjutan penyusunan Perkapolres tentang hukuman bagi pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN. (giat3088,3089,3090,3091/prog1/SP6/SS5/IKP14)
 - c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. (giat3073,3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
- 4) pengawasan berbasis TI; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13)
 - b) penerapan system pengaduan masyarakat secara online. (giat3073/prog1/SP6/SS5/IKP13)
- 5) peningkatan

- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mendukung pelaksanaan pendampingan Satker/Satwil atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerja Polri Berkelas Dunia guna persiapan dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap pemenuhan indikator WISPI dan UNPSA; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - b) mempertahankan capaian satker/satwil zona integritas yang sudah berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona integritas berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM); (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres dan Polsek; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - d) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)
 - e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)

f) melaksanakan

- f) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik. (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10)

8. Program Prioritas Kapolri, Program Quick Wins dan Pembangunan Zona Integritas

a. Program Prioritas Kapolri

- 1) Penataan dalam pembinaan personel;
- 2) Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi;
- 3) Peningkatan profesionalisme anggota Polri;
- 4) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan Sarpras khusus;
- 5) Peningkatan perlindungan terhadap warga negara untuk peningkatan rasa aman;
- 6) Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan;
- 7) Mengintensifkan sinergitas Polisional dengan Kementerian/Lembaga;
- 8) Meningkatkan penegakan hukum yang profesional obyektif dan bebas KKN;
- 9) Penguatan pengawasan Polri;
- 10) Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontinjensi Pemilukada serentak.

b. Program Quick Wins

- 1) Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;
- 2) Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme;
- 3) Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme;
- 4) Pembentukan dan pengefektifan Satgas Operasi Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS);

5) Pemberlakuan

- 5) Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Mabes, Polda dan Polres);
- 6) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
- 7) Pembentukan Tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan KPK);
- 8) Crash program pelayanan masyarakat : pelayanan bersih dari pencaloan.

c. Zona Integritas

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalaksana
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 4) Penguatan Pengawasan
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ALOKASI ANGGARAN.

9. Program dan Kegiatan Polres Karanganyar

a Program Dukungan Manajemen:

1) Tujuan :

Tujuan Program, adalah menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal, dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi di Polres Karanganyar.

2) Kegiatan :

a) Penerangan Masyarakat, dengan output layanan penerangan masyarakat yang dituangkan dalam komponen kegiatan dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003)

b) Dukungan

- b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri, dengan output:
- (1) layanan perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan :
 - (a) Gaji dan tunjangan (001)
 - (b) Operasional dan Pemeliharaan kantor (002).
 - (2) layanan dukungan manajemen Internal Perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
- c) Pertanggungjawaban profesi, dengan output penegakkan kode etik profesi yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- d) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri, dengan output Layanan penyelidikan pelanggaran pegawai pada Polri yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- e) Penegakkan tata tertib dan disiplin Polri dengan output penegakkan disiplin dan ketertiban yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- f) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, dengan output pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- g) Pemberian bantuan dan nasehat hukum, dengan output layanan bantuan hukum kepada institusi, pegawai negeri pada Polri dan keluarganya yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- h) Penyusunan dan penyuluhan hukum, dengan output peraturan perundang-undangan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).

- i) Penyusunan Kebijakan Polri, dengan output layanan penyusunan naskah kebijakan Polri yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
 - j) Reformasi Birokrasi Polri, dengan output layanan penyusunan naskah Reformasi Birokrasi Polri yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
 - k) Manajemen anggaran, dengan output layanan manajemen anggaran yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
- b. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri
- 1) Tujuan:
Tujuan program adalah untuk mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana, materiil, fasilitas baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - 2) Kegiatan :
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras, dengan output:
 - a) layanan Perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan operasional dan Pemeliharaan Kantor (002).
 - b) layanan perkantoran Sarpras yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Kantor (003).
- c. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 1) Tujuan :
Tujuan Program, adalah memelihara dan meningkatkan kondisi kamtibmas agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam beraktifitas dan meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan yang dimaksud.
 - 2) Kegiatan

2) Kegiatan

- a) analisis keamanan, dengan output Layanan informasi analisis keamanan yang dituangkan dalam komponen kegiatan dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
- b) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Politik, dengan output informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang Politik, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
- c) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Ekonomi, dengan output informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang Ekonomi, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- d) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang Sosial budaya, dengan output informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- e) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, dengan output informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- f) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan output :
 - (1) layanan perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan Operasional dan pemeliharaan kantor (002).
 - (2) layanan dukungan manajemen Harkamtibmas yang dituangkan dalam komponen kegiatan dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- g) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara, dengan output :
 - (1) layanan

- (1) layanan pembinaan fungsi Sabhara, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (2) Layanan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan (003).
- h) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital, dengan output layanan pembinaan pengamanan obyek vital/obyek vital nasional, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- i) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas, dengan output :
- (1) Layanan pembinaan teknis fungsi Lalu Lintas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (2) Layanan informasi budaya tertib lalu lintas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (3) Layanan bidang registrasi dan identifikasi lalu lintas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
 - (4) Layanan Turjawali Lalu lintas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (5) Operasi kepolisian bidang Lalu Lintas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (6) Layanan dukungan manajemen di bidang Lantas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- j) Pembinaan

- j) Pembinaan potensi keamanan, dengan output :
 - (1) pemberdayaan potensi keamanan, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (2) penguatan peran Bhabinkamtibmas, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - k) Pengendalian operasi kepolisian, dengan output layanan pengendalian operasi kepolisian, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - l) Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban, dengan output layanan pelacakan, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- 1) Tujuan:

Tujuan Program, adalah menanggulangi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi tanpa melanggar HAM.
 - 2) Kegiatan
 - a) Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan output layanan dukungan manajemen lidik sidik yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
 - b) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan output hasil pemeriksaan Identifikasi yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
 - c) Penyelenggaraan

- c) Penyelenggaraan laboratorium Forensik dengan output hasil Pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam komponen kegiatan pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- d) Penindakan tindak pidana umum dengan output :
 - (1) Penanganan tindak pidana umum yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
 - (2) Perawatan dan makan tahanan yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003);
- e) Penindakan tindak pidana Narkoba dengan output kegiatan Penanganan tindak pidana narkoba yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- f) Penindakan Tindak Pidana Korupsi dengan output kegiatan Penanganan tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- g) Penindakan Tindak Pidana Siber dengan output kegiatan penanganan Tindak Pidana Siber dengan komponen pendukung Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
- h) Penindakan tindak pidana laka lantas dengan output layanan dukungan penanganan tindak pidana laka lantas yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
- i) Penindakan Tindak Pidana tertentu dengan output kegiatan penanganan Tindak Pidana tertentu dengan komponen pendukung Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).

j) Koordinasi

- j) Koordinasi dan Pengawasan PPNS dengan output bantuan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Penyidik PNS yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

10. Pagu Alokasi Anggaran.

Pagu Alokasi Anggaran Polres Karanganyar tahun 2021 sebesar **Rp 80.750.049.000,- (Delapan puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** yaitu berupa anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan pembiayaan dari **Rupiah Murni (RM)** dan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen (060.01.14) dengan sebesar Rp. 60.209.358.000,- (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), untuk mendukung kegiatan yang meliputi :

- 1) Penerangan Masyarakat Rp. 151.220.000,-
- 2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp. 59.887.036.000,-
- 3) Pertanggungjawaban Profesi Rp. 17.694.000,-
- 4) Penyelenggarakan Pengamanan Internal Polri Rp. 13.800.000,-
- 5) Penegakan tata Tertib dan Disiplin Polri Rp. 30.968.000,-
- 6) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Rp. 45.000.000,-
- 7) Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Rp. 7.780.000,-
- 8) Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Rp. 16.100.000,-
- 9) Penyusunan Kebijakan Polri Rp. 8.240.000,-
- 10) Reformasi Birokrasi Polri Rp. 20.000.000,-
- 11) Manajemen Anggaran Rp. 11.520.000,-

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, dengan anggaran sebesar **Rp. 6.331.516.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras.

c. Program

- c. Program Profesionalisme SDM Polri dengan kegiatan Pengendalian Pegawai Polri dengan anggaran sebesar **Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).**
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran sebesar **Rp. 10.753.544.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah),** yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- 1) Analisis Keamanan Rp. 31.220.000,-
 - 2) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik Rp. 341.740.000,-
 - 3) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi Rp. 328.075.000,-
 - 4) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya Rp. 306.075.000,-
 - 5) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara Rp. 463.774.000,-
 - 6) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 3.971.550.000,-
 - 7) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Rp. 840.140.000,-
 - 8) Penyelenggarakan Pengamanan Objek Vital Rp. 152.240.000,-
 - 9) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang lintas Rp. 1.004.217.000,-
 - 10) Pembinaan Potensi Keamanan Rp. 2.120.378.000,-
 - 11) Pengendalian Operasi Kepolisian Rp. 1.053.610.000,-
 - 12) Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban Rp. 140.525.000,-

e. Program

- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran sebesar **Rp. 3.452.631.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** meliputi kegiatan :
- 1) Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 14.000.000,-
 - 2) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 17.700.000,-
 - 3) Penyelenggaraan Laboratorium Forensik Rp. 32.400.000,-
 - 4) Penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 2.070.700.000,-
 - 5) Penindakan Tindak Pidana Narkoba Rp. 686.000.000,-
 - 6) Tindak Pidana Korupsi Rp. 480.000.000,-
 - 7) Penindakan Tindak Pidana Siber Rp. 28.000.000,-
 - 8) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas Rp. 96.331.000,-
 - 9) Penindakan Tindak Pidana tertentu Rp. 14.000.000,-
 - 10) Koordinasi dan Pengawasan PPNS Rp. 13.500.000,-

V. PENUTUP.

11. Penutup

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Karanganyar Tahun Anggaran 2021 disusun untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 di jajaran Polres Karanganyar.

Ditetapkan di: Karanganyar

pada tanggal: 24 Nopember 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

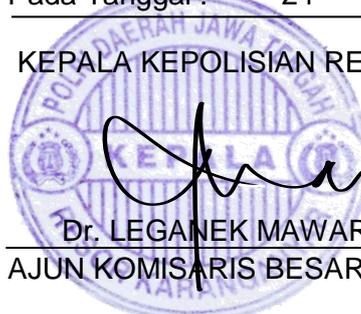
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/PENDUKUNG	TARGET	KET.
1	2	3	4	5
	Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Karanganyar	Indeks Keamanan dan Ketertiban wilayah Kabupaten Karanganyar	4,2	SASARAN IMPACT
1	pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar	Indeks Harkamtibmas	41,47	
2	penegakkan hukum secara berkeadilan	Indeks Gakkum	90,09	
3	professionalisme SDM Polres Karanganyar yang	Indeks Profesionalitas SDM Polri	48,82	
4	Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini.	Persentase pemenuhan Alkom siap operasional	62,14 %	
		Persentase Pemenuhan pembangunan di Jajaran Polres Karanganyar	28,59 %	
		Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini	76,53	
		Persepsi user terhadap kemudahan akses data	66,21	
5	Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Karanganyar	Nilai AKIP	70,91	
		Penyajian Laporan Keuangan	2	
		Nilai Reformasi Birokrasi	80,32	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	97,65	
		Nilai Kinerja Anggaran	95,68	
		Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100	
		Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi polri	100	

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 24 November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kementerian/Lembaga : **KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR**

2. VISI : **Terwujudnya Kabupaten Karanganyar Yang Aman dan Tertib**

3. MISI : 1. **Melindungi;**
 2. **Mengayomi;**
 3. **Melayani.**

4. **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L**

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis	Target 2021	Alokasi 2021
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Karanganyar			
		Indeks Harkamtibmas	28,97	
02	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan			
		Indeks Gakkum	90,09	
03	Profesionalisme SDM Polres Karanganyar			
		Indeks Profesionalitas SDM Polres Karanganyar	50,10	
04	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah			
		Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional	62,14%	
		Persentase Pemenuhan Pembangunan di Jajaran Polda Jateng	28,59%	
		Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	76,53	
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	66,21	
05	Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah			
		Nilai AKIP	70,91	
		Level Kapabilitas APIP	Level 2	
		Penyajian Laporan Keuangan	2	
		Nilai Reformasi Birokrasi	80,32	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	97,65	
		Nilai Kinerja Anggaran	98,21	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	90,10%	
		JUMLAH		

5. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2021					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN + PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
01	Program Dukungan Manajemen	60.209.358.000	0	0	0	60.209.358.000	70.794.558.000	77.171.869.000	83.549.481.000
02	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5.575.390.000	0	756.126.000	0	6.331.516.000	6.985.648.000	7.318.298.000	7.650.948.000
03	Program Profesionalisme SDM Polri	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.827.681.000	0	1.925.863.000	0	10.753.544.000	11.550.349.000	12.100.231.000	12.650.383.000
05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.356.300.000	0	96.331.000	0	3.452.631.000	3.503.001.000	3.666.580.000	3.830.160.000
Jumlah		77.624.979.000	0	3.125.070.000	0	80.750.049.000	92.836.556.000	100.259.978.000	107.683.972.000

Karanganyar, November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



[Handwritten Signature]
Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. Kementerian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Karanganyar
3. Program : Program Dukungan Manajemen
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Karanganyar
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

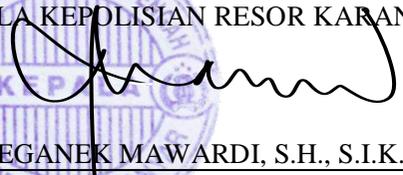
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan			80,750,049,000
		Nilai AKIP	70,91	
02	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal			
		Level Kapabilitas APIP	Level 2	
03	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional			
		Penyajian Laporan Keuangan	2	
04	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan			
		Nilai Reformasi Birokrasi	80,32	
05	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi			
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK).	97,65	
		Nilai Kinerja Anggaran.	98,21	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 %	
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	90,10 %	
				80,750,049,000

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+ PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
3070	Penerangan Masyarakat	151,220,000	0	0	0	151,220,000	158,781,000	166,720,050	175,056,053
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	59,887,036,000	0	0	0	59,887,036,000	65,875,739,600	71,864,443,200	77,853,146,800
3088	Pertanggungjawaban Profesi	17,694,000	0	0	0	17,694,000	18,578,700	19,463,400	20,348,100
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	13,800,000	0	0	0	13,800,000	14,490,000	15,180,000	15,870,000
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	30,968,000	0	0	0	30,968,000	32,516,400	34,064,800	35,613,200
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	45,000,000	0	0	0	45,000,000	47,250,000	49,500,000	51,750,000
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	7,780,000	0	0	0	7,780,000	8,169,000	8,558,000	8,947,000
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	16,100,000	0	0	0	16,100,000	16,905,000	17,710,000	18,515,000
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	8,240,000	0	0	0	8,240,000	8,652,000	9,064,000	9,476,000
5053	Reformasi Birokrasi Polri	20,000,000	0	0	0	20,000,000	21,000,000	22,000,000	23,000,000
5054	Manajemen Anggaran	11,520,000	0	0	0	11,520,000	12,096,000	12,672,000	13,248,000
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	5,575,390,000	0	756,126,000	0	6,331,516,000	6,648,091,800	6,964,667,600	7,281,243,400
3107	Pengendalian Pegawai Polri	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,150,000	3,300,000	3,450,000
3112	Analisis Keamanan	31,220,000	0	0	0	31,220,000	32,781,000	34,342,000	35,903,000
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	340,445,000	0	1,295,000	0	341,740,000	358,827,000	375,914,000	393,001,000
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	326,780,000	0	1,295,000	0	328,075,000	344,478,750	360,882,500	377,286,250
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	304,780,000	0	1,295,000	0	306,075,000	321,378,750	336,682,500	351,986,250
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	462,109,000	0	1,665,000	0	463,774,000	321,378,750	336,682,500	351,986,250
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,749,210,000	0	222,340,000	0	3,971,550,000	4,170,127,500	4,368,705,000	4,567,282,500
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	8,640,000	0	831,500,000	0	840,140,000	882,147,000	924,154,000	966,161,000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0	0	152,240,000	0	152,240,000	159,852,000	167,464,000	175,076,000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	0	0	1,004,217,000	0	1,004,217,000	1,054,427,850	1,104,638,700	1,154,849,550
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	2,063,612,000	0	56,766,000	0	2,120,378,000	2,226,396,900	2,332,415,800	2,438,434,700
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	1,053,610,000	0	0	0	1,053,610,000	1,106,290,500	1,158,971,000	1,221,651,500
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	140,525,000	0	0	0	140,525,000	147,551,250	154,577,500	161,603,750
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,700,000	15,400,000	16,100,000
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	17,700,000	0	0	0	17,700,000	18,585,000	19,470,000	20,355,000
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	32,400,000	0	0	0	32,400,000	34,020,000	35,640,000	37,260,000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	2,070,700,000	0	0	0	2,070,700,000	2,174,235,000	2,277,770,000	2,381,305,000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	686,000,000	0	0	0	686,000,000	720,300,000	754,600,000	788,900,000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	480,000,000	0	0	0	480,000,000	504,000,000	528,000,000	552,000,000
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	28,000,000	0	0	0	28,000,000	29,400,000	30,800,000	32,200,000
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	0	0	96,331,000	0	96,331,000	101,147,550	105,964,100	110,780,650

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+ PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,700,000	15,400,000	16,100,000
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	13,500,000	0	0	0	13,500,000	14,175,000	14,850,000	15,525,000
Jumlah		77,624,979,000	0	3,125,070,000	0	80,750,049,000	84,787,551,450	88,825,053,900	92,862,556,350

Karanganyar, November 2020
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2021

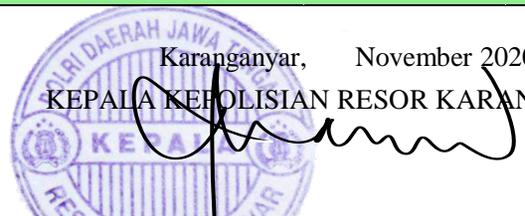
1. **Kementrian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. **Sasaran Strategis** : Modernisasi Teknologi Polres Karanganyar
 3. **Program** : Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri
 4. **Unit Organisasi** : Kepolisian Resor Karanganyar
 5. **Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	Terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta layanan internal			6.331.516,000
		Modernisasi Sarana dan Prasarana sesuai teknologi terkini	76,53	
Jumlah				6.331.516,000

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	5.575.390,000	0,0	756.126,000	0,0	6.331.516,000	6.964.667,000	7.661.134,000	8.427.247,000
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah		5.575.390,000	0,0	756.126,000	0,0	6.331.516,000	6.964.667,000	7.661.134,000	8.427.247,000

Karanganyar, November 2020
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2021

1. **Kementrian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. **Sasaran Strategis** : Profesionalisme SDM Polres Karanganyar
3. **Program** : Program Profesionalisme SDM Polri
4. **Unit Organisasi** : Kepolisian Resor Karanganyar
5. **Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional			3,000,000
		Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya	50,10	
02	Memberdayakan SDM Polri di bidang rekrutmen, pembinaan karier, perawatan personil hingga pengakhiran dinas secara profesional sesuai standar kompetensi			
		Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya		
Jumlah				3,000,000

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
3107	Pengendalian Pegawai Polri	3,000,000	0,0	0,0	0,0	3,000,000	3,330,000	3,630,000	3,990,000
Jumlah		3,000,000	0,0	0,0	0,0	3,000,000	3,330,000	3,630,000	3,990,000

Karanganyar, November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2021

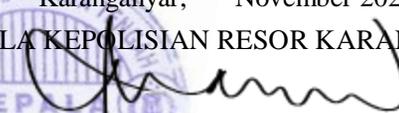
1. **Kementrian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. **Sasaran Strategis** : Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar
3. **Program** : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. **Unit Organisasi** : Kepolisian Resor Karanganyar
5. **Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan			10,753,554,000
		Nilai AKIP	70,91	
02	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan			
		Level Kapabilitas APiP	Level 2	
03	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional			
		Penyajian Laporan Keuangan	2	
04	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan			
		Nilai Reformasi Birokrasi	80,32	
05	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi			
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK).	97,65	
		Nilai Kinerja Anggaran.	98,21	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 %	
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapil Polri	90,10 %	
				10,753,554,000

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2021	2022	2023
3112	Analisis Keamanan	31,220,000	0,0	0,0	0,0	31,220,000	34,342,000	37,464,000	40,586,000
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	340,445,000	0,0	1,295,000	0,0	341,740,000	375,914,000	410,008,000	444,262,000
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	326,780,000	0,0	1,295,000	0,0	328,075,000	360,882,500	393,690,000	426,497,500
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	304,780,000	0,0	1,295,000	0,0	306,075,000	336,682,500	367,290,000	397,897,500
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	462,109,000	0,0	1,665,000	0,0	463,774,000	510,151,400	556,528,800	602,906,200
3128	Dukungan Mangemen Dan Teknis Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	3,749,210,000	0,0	222,340,000	0,0	3,971,550,000	4,368,705,000	4,765,860,000	5,163,015,000
3130	Pembinaa Pelayanan Fungsi Sabhara	8,640,000	0,0	831,500,000	0,0	840,140,000	924,154,000	1,008,168,000	1,092,182,000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0,0	0,0	152,240,000	0,0	152,240,000	167,464,000	182,688,000	197,912,000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat di bidang Lintas	0,0	0,0	1,004,217,000	0,0	1,004,217,000	1,104,638,700	1,205,060,400	1,305,482,100
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	2,063,612,000	0,0	56,766,000	0,0	2,120,378,000	2,332,415,800	2,544,453,600	2,756,491,400
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	1,053,610,000	0,0	0,0	0,0	1,053,610,000	1,158,971,000	1,264,332,000	1,369,693,000
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	140,525,000	0,0	0,0	0,0	140,525,000	154,577,500	168,630,000	182,682,500
Jumlah		8,480,931,000	0,0	2,272,613,000	0,0	10,753,554,000	11,828,909,400	12,904,264,800	13,979,620,200

Karanganyar, November 2020
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942



FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. Kementerian/Lembaga** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Sasaran Strategis** : Penegakan Hukum Secara Berkeadilan
- 3. Program** : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- 4. Unit Organisasi** : Kepolisian Resor Karanganyar
- 5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2021	Alokasi 2021
01	Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi			3,452,631,000
		Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK).	97,65	
		Nilai Kinerja Anggaran.	98,21	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 %	
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	90,10 %	
Jumlah				3,452,631,000

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021				Jumlah	Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN		2022	2023	2024
	Pidana Laka Lantas								
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	14,000,000	0,0	0,0	0,0	14,000,000	15,400,000	16,800,000	18,200,000
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	17,700,000	0,0	0,0	0,0	17,700,000	19,470,000	21,240,000	23,010,000

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2021				Prakiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
3141	Penyelenggaraan Laboratorium Forensik	32,400,000		0,0	0,0	32,400,000	35,640,000	38,880,000	42,120,000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	2,070,700,000	0,0	0,0	0,0	2,070,700,000	2,277,770,000	2,484,840,000	2,691,910,000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	686,000,000	0,0	0,0	0,0	686,000,000	754,600,000	823,200,000	891,800,000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	480,000,000	0,0	0,0	0,0	480,000,000	528,000,000	576,000,000	624,000,000
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	28,000,000	0,0	0,0	0,0	28,000,000	30,800,000	33,600,000	36,400,000
4343	Penindakan tindak pidana lalu lintas	0,0	0,0	96,331,000	0,0	96,331,000	105,964,100	115,597,200	125,230,300
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	14,000,000	0,0	0,0	0,0	14,000,000	15,400,000	16,800,000	18,200,000
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	13,500,000	0,0	0,0	0,0	13,500,000	14,850,000	16,200,000	17,550,000
Jumlah		3,356,300,000		96,331,000		3,452,631,000	3,797,894,100	4,143,157,200	4,488,420,300

Karanganyar, November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)

Kode	Program	Usulan Pendanaan Tahun 2021					Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
01	Program Dukungan Manajemen	60.209.358.000	0,0		0,0	60.209.358.000	66.230.293.800	72.853.323.180	80.138.655.498
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	5.575.390.000	0,0	756.126.000	0,0	6.331.516.000	6.964.667.600	7.661.134.360	8.427.247.796
03	Program Profesionalisme SDM Polri	3.000.000	0,0		0,0	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000
04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.827.681.000	0,0	1.925.863.000	0,0	10.753.544.000	11.828.898.400	13.011.788.240	14.312.967.064
05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.356.300.000	0,0	96.331.000	0,0	3.452.631.000	3.797.894.100	4.177.683.510	4.595.451.861
Jumlah		77.624.979.000	0	3.125.070.000	0	80.750.049.000	88.825.053.900	97.707.559.290	107.478.315.219

Karanganyar, November 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

 Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2021				Jumlah	Perkiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN		2022	2023	2024
01	Program Dukungan Manajemen	60.209.358.000	0,0	0,0	0,0	60.209.358.000	66.230.293.800	72.853.323.180	80.138.655.498
01.3070	Penerangan Masyarakat	151.220.000	0,0	0,0	0,0	151.220.000	166.342.000	182.976.200	201.273.820
01.3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	59.887.036.000	0,0	0,0	0,0	59.887.036.000	65.875.739.600	72.463.313.560	79.709.644.916
01.3088	Pertanggungjawaban Profesi	17.694.000	0,0	0,0	0,0	17.694.000	19.463.400	21.409.740	23.550.714
01.3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	13.800.000	0,0	0,0	0,0	13.800.000	15.180.000	16.698.000	18.367.800
01.3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	30.968.000	0,0	0,0	0,0	30.968.000	34.064.800	37.471.280	41.218.408
01.3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	45.000.000	0,0	0,0	0,0	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000
01.3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	7.780.000	0,0	0,0	0,0	7.780.000	8.558.000	9.413.800	10.355.180
01.3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	16.100.000	0,0	0,0	0,0	16.100.000	17.710.000	19.481.000	21.429.100
01.5051	Penyusunan Kebijakan Polri	8.240.000	0,0	0,0	0,0	8.240.000	9.064.000	9.970.400	10.967.440
01.5053	Reformasi Birokrasi Polri	20.000.000	0,0	0,0	0,0	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
01.5054	Manajemen Anggaran	11.520.000	0,0	0,0	0,0	11.520.000	12.672.000	13.939.200	15.333.120
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	5.575.390.000	0,0	756.126.000	0,0	6.331.516.000	6.964.667.600	7.661.134.360	8.427.247.796
02.5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	5.575.390.000	0,0	756.126.000	0,0	6.331.516.000	6.964.667.600	7.661.134.360	8.427.247.796

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2021				Perkiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
03	Program Profesionalisme SDM Polri	3.000.000	0,0	0,0	0,0	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000
03.0001	Dukungan Manajemen Profesionalisme SDM	3.000.000	0,0	0,0	0,0	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000
04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.480.931.000	0,0	2.272.613.000	0,0	10.753.544.000	11.828.898.400	13.011.788.240	14.312.967.064
04.312	Analisis Keamanan	31.220.000	0,0	0,0	0,0	31.220.000	34.342.000	37.776.200	41.553.820
04.314	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	340.445.000	0,0	1.295.000	0,0	341.740.000	375.914.000	413.505.400	454.855.940
04.315	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	326.780.000	0,0	1.295.000	0,0	328.075.000	360.882.500	396.970.750	436.667.825
04.316	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	304.780.000	0,0	1.295.000	0,0	306.075.000	336.682.500	370.350.750	407.385.825
04.317	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	462.109.000	0,0	1.665.000	0,0	463.774.000	510.151.400	561.166.540	617.283.194
04.318	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.749.210.000		222.340.000	0,0	3.971.550.000	3.951.585.000	4.346.743.500	4.781.417.850
04.3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	8.640.000	0,0	831.500.000	0,0	840.140.000	924.154.000	1.016.569.400	1.118.226.340
04.3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0,0	0,0	152.240.000	0,0	152.240.000	167.464.000	184.210.400	202.631.440
04.3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat di Bidang Lantas	0,0	0,0	1.004.217.000	0,0	1.004.217.000	1.104.638.700	1.215.102.570	1.336.612.827
04.5076	Pembinaan Potensi Keamanan	2.063.612.000	0,0	56.766.000	0,0	2.120.378.000	2.332.415.800	2.565.657.380	2.822.223.118
04.5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	1.053.610.000	0,0	0,0	0,0	1.053.610.000	1.158.971.000	1.274.868.100	1.402.354.910
04.5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	140.525.000	0,0	0,0	0,0	140.525.000	154.577.500	170.035.250	187.038.775
05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.356.300.000	0,0	96.331.000	0,0	3.452.631.000	3.797.894.100	4.177.683.510	4.595.451.861

Kode	Program/Kegiatan	Usulan Pendanaan Tahun 2021				Perkiraan Kebutuhan			
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2022	2023	2024
05.3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	14.000.000	0,0	0,0	0,0	14.000.000	15.400.000	16.940.000	18.634.000
05.3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	17.700.000	0,0	0,0	0,0	17.700.000	19.470.000	21.417.000	23.558.700
05.3141	Penyelenggaraan Laboratorium Forensik	32.400.000	0,0	0,0	0,0	32.400.000	35.640.000	39.204.000	43.124.400
05.3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	2.070.700.000	0,0	0,0	0,0	2.070.700.000	2.277.770.000	2.505.547.000	2.756.101.700
05.3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	686.000.000	0,0	0,0	0,0	686.000.000	754.600.000	830.060.000	913.066.000
05.3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	480.000.000	0,0	0,0	0,0	480.000.000	528.000.000	580.800.000	638.880.000
05.3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	28.000.000	0,0	0,0	0,0	28.000.000	30.800.000	33.880.000	37.268.000
05.4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	0,0	0,0	96.331.000	0,0	96.331.000	105.964.100	116.560.510	128.216.561
05.5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	14.000.000	0,0	0,0	0,0	14.000.000	15.400.000	16.940.000	18.634.000
05.5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	13.500.000	0,0	0,0	0,0	13.500.000	14.850.000	16.335.000	17.968.500
Jumlah									

Karanganyar, November 2020
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR



Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942